

ANALISIS KANDUNGAN INFORMASI LAPORAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA

Sukartini

Dosen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang

Email: tiensukartini28@gmail.com

Amy Fontanella

Dosen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang

Email: amyfontanella99@gmail.com

ABSTRACT

This research analyzes information content reflected in three local government reports in Indonesia (Local Government Finance Report (LKPD), Government Institution's Performance Accountability Report / GIPAR (LAKIP), and Government Management Report (LPPD)). The research was conducted in District and City Government in Indonesia utilizing data from 2015-2016. The findings indicate information redundancy in all of those three reports, and, there is as well data inconsistency used therein. It shows that there is importance in designing comprehensive model of local government reports in Indonesia which suits the needs of the users.

Key words : *Financial reports, performance accountability reports, local government, information content*

1.PENDAHULUAN

Penelitian ini secara spesifik akan melakukan analisis kandungan (content analysis) terhadap informasi yang tersaji dalam 3 laporan yang harus disusun pemerintah daerah secara terpisah yaitu LKPD, LAKIP dan LPPD. Hal ini dilakukan guna mendapatkan pemahaman yang komprehensif sejauhmana korelasi antar ketiga laporan ini dan kemungkinan terjadinya pengulangan (*redundancy*) informasi pada ketiga laporan ini. Investigasi dan analisis komparasi ini penting dilakukan karena pengguna memerlukan suatu laporan pemerintah daerah yang komprehensif (Pablos, 2002; Thayer, 1978) dan laporan yang menggabungkan unsur keuangan dan kinerja (Jones, 1999).

Penelitian ini penting dilakukan karena penyusunan berbagai jenis laporan yang diwajibkan peraturan perundang-undangan memerlukan banyak biaya, melibatkan banyak sumber daya manusia dan memerlukan banyak dukungan infrastruktur (Halim, 2007). Jika laporan yang dihasilkan hanya menjadi simbol akuntabilitas saja (Mimba et al, 2013) dan kebermanfaatannya bagi pengguna belum optimal (Martiningsih, 2008) maka perlu dilakukan analisis lebih lanjut kenapa hal ini terjadi dan upaya apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kondisi ini.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, praktisi dan kepentingan regulasi. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur tentang kandungan informasi yang disajikan dalam laporan pemerintah khususnya dalam konteks pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi seluruh praktisi pemerintah daerah seperti manajemen (internal) pemerintah daerah, lembaga

legislatif dan lembaga pengawas/pemeriksa. Bagi manajemen pemerintah penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam penyusunan laporan baik LKPD, LAKIP maupun LPPD. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi manajemen untuk memastikan reliabilitas dan validitas informasi yang disampaikan dalam ketiga laporan tersebut khususnya terhadap informasi yang diduga terjadi kesamaan (*redundancy*). Penelitian ini juga dapat memberikan wawasan tentang kebutuhan informasi masing-masing kelompok pengguna sehingga dalam penyusunan laporan manajemen dapat mempertimbangkan kebutuhan ini. Bagi lembaga legislatif penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam melakukan evaluasi dan melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Penelitian ini memberikan pemahaman pada anggota DPRD tentang kandungan informasi yang disajikan dalam berbagai laporan pemerintah serta kebutuhan pengguna atas informasi yang disajikan tersebut. Dengan memahami kandungan informasi pada masing-masing laporan, anggota DPRD dapat mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Bagi lembaga pengawas baik pengawas internal (inspektorat daerah, BPKP) maupun pemeriksa/auditor BPK penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam melakukan pemeriksaan. Hasil analisis kandungan informasi pada laporan ini bermanfaat bagi lembaga pengawas untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif atas informasi yang tersaji sehingga proses pengawasan dan pemeriksaan juga dapat dilakukan secara lebih komprehensif.

Bagi regulator dalam hal ini pemerintah pusat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Saat ini LKPD, LAKIP dan LPPD diatur melalui aturan yang berbeda, menjadi ruang lingkup kewenangan tugas dan tanggungjawab kementerian yang berbeda dan dievaluasi secara terpisah. Hal ini mengakibatkan ketiga laporan yang sama-sama bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas ini berjalan sendiri-sendiri mulai dari proses penyusunannya hingga proses evaluasinya. Disamping itu penelitian ini dapat menjadi masukan bagi regulator untuk mengatur suatu pelaporan yang komprehensif dan terintegrasi bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia.

2.LANDASAN TEORI

2.1.Teori Institusional (Institutional theory)

Teori institusional (*Institutional Theory*) atau teori kelembagaan merupakan sebuah teori yang berasal dari konsep-konsep dalam ilmu sosiologi. Teori ini menjelaskan dinamika di dalam sebuah organisasi yang terdiri dari sekumpulan manusia (Brignal dan Modell, 2000). Teori ini mengasumsikan bahwa faktor utama yang menentukan pembentukan struktur organisasi adalah tekanan baik yang berasal dari konstituen eksternal dan internal. Teori ini juga mengkritik teori ekonomi dan kontingensi yang sangat rasional serta menjelaskan struktur dan fungsi organisasi dengan ukuran efisiensi (Di Maggio dan Powell, 1983). Teori ekonomi dan kontingensi seolah mengabaikan kekuatan di luar organisasi yang non-rasional seperti negara, norma-norma sosial, tradisi, konvensi, yang membentuk organisasi itu. Padahal perilaku organisasi atau keputusan yang diambil oleh organisasi akan dipengaruhi oleh institusi yang ada di luar organisasi. Organisasi akan berupaya untuk menyesuaikan diri dengan tekanan dari luar untuk mempertahankan eksistensinya (Di Maggio dan Powell, 1983).

Kekhususan teori institusional terletak pada paradigma norma-norma dan legitimasi, cara berpikir dan semua fenomena sosiokultural yang konsisten dengan instrumen teknis pada organisasi (Brignal dan Modell, 2000). DiMaggio dan Powell (1983), melihat bahwa organisasi terbentuk karena kekuatan di luar organisasi yang

membentuk lewat proses mimicry atau imitasi dan compliance. Kontributor lain teori ini adalah Meyer dan Scott (1983), menyatakan bahwa organisasi berada di bawah tekanan untuk menciptakan bentuk-bentuk sosial yang hanya terbentuk oleh pendekatan konformitas dan berisi struktur-struktur terpisah pada asas operasional.

Dari waktu ke waktu, organisasi cenderung untuk bergerak ke arah keseragaman (isomorphisme) ketika sudah mencapai kemapanan (DiMaggio dan Powell (1983). Isomorphisme adalah proses yang memaksa satu unit dalam populasi menyerupai unit lain dalam menghadapi pengaturan yang sama dari suatu kondisi lingkungan tertentu. DiMaggio dan Powell (1983), melihat ada tiga bentukan institusional yang bersifat isomorphis yaitu, pertama; coersif isomorphis yang menunjukkan bahwa organisasi mengambil beberapa bentuk atau melakukan adopsi terhadap organisasi lain karena tekanan-tekanan negara dan organisasi lain atau masyarakat yang lebih luas. Kedua; mimesis isomorphis, yaitu imitasi sebuah organisasi oleh organisasi yang lain. Ketiga; normatif isomorphis, karena adanya tuntutan profesional.

Di Indonesia, potensi sumber tekanan isomorfik berpotensi berasal dari pemerintah pusat melalui pemberlakuan hukum dan peraturan yang diwajibkan bagi pemerintah daerah (Akbar, et al., 2012). Akbar, et al., (2012) yang melakukan penelitian tentang pengukuran kinerja pada pemerintah daerah di Indonesia menemukan pengukuran kinerja yang dilakukan pemerintah (LAKIP) lebih diutamakan untuk memenuhi aturan yang berlaku bukan untuk perbaikan efektivitas dan efisiensi organisasi. Pemberlakuan aturan yang mengharuskan semua pemerintah daerah menyusun laporan kinerja merupakan salah satu bentuk isomorphisme dalam organisasi ini (Akbar, et al, 2012). Aturan ini mendorong terjadinya tekanan yang bersifat koersif, karena sebagian besar pemerintah daerah sangat tergantung pada pemerintah pusat dalam hal sumber daya keuangan (Akbar, et. al, 2012). Meskipun pemerintah daerah wajib menyampaikan berbagai jenis laporan, ini tidak berarti bahwa mereka benar-benar menggunakan informasi kinerja dalam praktek manajemen sehari-hari mereka (Akbar, et. al, 2012).

Keharusan menyusun berbagai jenis laporan juga dapat dianggap sebagai bentuk isomorfisme mimetik atau upaya meniru pemerintah Indonesia terhadap pemerintahan di negara lain yang dinilai lebih maju yang mengarah kepada pelaksanaan suatu mekanisme kerja yang hanya sebatas seremonial formil, bukan berorientasi pada substansi (Akbar, et al, 2012). Selain itu, Halim (2007) menilai bahwa niat penggunaan sistem pengukuran kinerja di sebagian besar instansi pemerintah lebih didominasi oleh tekanan luar (Tolbert dan Zucker, 1983) sehingga memunculkan kepatuhan semu atau pelaksanaan ritual yang bertujuan agar organisasi dilihat patuh oleh lingkungan diluarnya (Gudono, 2014). Oleh karena itu, agar permasalahan yang ada dapat dimitigasi, maka perlu untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan analisis kebutuhan informasi pengguna atas informasi dalam laporan yang disajikan pada instansi pemerintah.

2.2. Pelaporan Pemerintah Daerah

2.2.1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Diterbitkannya UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara diikuti dengan kewajiban pemerintah pada berbagai level (Pusat, Provinsi, Kabupaten/kota) untuk menyusun laporan keuangan. Peraturan Pemerintah (PP) No.24 tahun 2005 yang disempurnakan menjadi PP No.71 tahun 2010 mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah (Halim, 2007). Hak publik atas

informasi keuangan merupakan konsekuensi dari konsep pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban publik mensyaratkan bahwa pemerintah wajib memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan (accountability & stewardship).

Laporan keuangan pemerintah haruslah memuat informasi akuntansi yang merepresentasikan kondisi keuangan, posisi keuangan, aliran kas dan data-data keuangan lain suatu pemerintahan. Pelaporan keuangan pemerintah bertujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik (Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan). Penyusunan laporan keuangan daerah ini merupakan manifestasi dari kewajiban yang tertuang dalam seperangkat peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti PP71/2010, PP 24/2005, Permendagri 13/2006, dan Permendagri 59/2007. Disamping itu, tuntutan transparansi dan akuntabilitas sebagai salah satu pilar dari perwujudan good governance juga berdampak pada kewajiban untuk menyusun laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan pemerintah daerah yang dipersyaratkan dalam PP 71/ 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan antara lain meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih (SAL), Laporan Arus Kas, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Secara umum laporan keuangan pemerintah daerah bertujuan memberikan informasi yang bermanfaat untuk pengguna dalam menilai akuntabilitas dan pengambilan keputusan (SAP, 2010). Informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, yang akan diproyeksikan untuk perencanaan tahun selanjutnya (Halim, 2007). Lebih jauh laporan keuangan pemerintah diharapkan dapat menjadi media akuntabilitas dan dasar dalam pengambilan keputusan (Ryan et al., 2002). Namun, laporan tahunan (laporan keuangan) seringkali belum melaporkan akuntabilitas secara keseluruhan dari entitas pemerintahan (Steccolini, 2002). Padahal secara umum laporan keuangan merupakan media utama akuntabilitas (pendapat lainnya: Boyne dan Law, 1991; Ryan et al., 2000; Taylor dan Rosair, 2000; Coy et al., 2001; Mack et al., 2001).

2.2.2Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik (Inpres 7/1999). Instansi pemerintah harus melaporkan akuntabilitas kinerjanya dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Instansi yang wajib menyampaikan LAKIP adalah Kementerian /Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri.

Landasan hukum penyusunan LAKIP adalah Inpres 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah, PP 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Permenpan 29/2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP berisi informasi tentang gambaran umum organisasi, perencanaan dan perjanjian kinerja dan akuntabilitas kinerja.

Namun dalam prakteknya LAKIP yang disusun oleh pemerintah hanya fokus pada memenuhi kesesuaian dengan format yang diatur dan ketepatanwaktuan penyampaian, LAKIP belum memperhatikan kandungan informasi yang disajikan (Mimba et al., 2012). Hal senada juga ditemukan oleh Akbar et al (2012), penetapan indikator kinerja didalam LAKIP lebih diperuntukkan memenuhi aturan yang berlaku bukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas organisasi. Kurangnya pertimbangan kualitas informasi dalam LAKIP yang disebabkan oleh lemahnya kapasitas institusional mengakibatkan pengukuran kinerja hanya menjadi simbol saja (Mimba et al, 2012).

2.2.3Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

LPPD merupakan laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama satu tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) (PP 3/2007). Pelaporan LPPD mencakup urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. LPPD disusun berdasarkan asas transparansi dan akuntabilitas. LPPD kabupaten/kota diserahkan oleh bupati/walikota kepada menteri melalui gubernur. LPPD berisi informasi tentang gambaran umum daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.

3.METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif melalui konten analisis terhadap kandungan informasi yang tersaji pada LKPD, LAKIP dan LPPD. Konten analisis dilakukan dengan menggunakan form checklist informasi pada masing-masing laporan kemudian dilakukan analisis komparasi kandungan informasi pada ketiga jenis laporan tersebut. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Data informasi dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Data informasi dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2011-2012, Data informasi dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2011-2012.

Data hasil observasi, wawancara dan FGD. Wawancara dan FGD dilakukan dengan tim penyusun LKPD, tim penyusun LAKIP dan tim penyusun LPPD.

Data tahun 2011 dan 2012 digunakan karena beberapa aturan terkait LKPD dan LAKIP dikeluarkan pada tahun 2010 dan mulai berlaku sejak tahun pelaporan 2011 seperti PP no 71/2010 tentang standar akuntansi pemerintah dan Permenpan no 29/2010 tentang penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

4.HASIL DAN PEMBAHASAN

Langkah pertama dalam penelitian ini adalah melakukan konten analisis dengan menggunakan cek list atas informasi yang tersaji pada LKPD, LAKIP dan LPPD. Konten analisis dilakukan terkait 4 aspek yang meliputi dasar hukum penyajian laporan, tujuan penyusunan laporan, isi laporan dan mekanisme evaluasi/penilaian laporan tersebut. Berikut hasil analisis informasi pada ketiga laporan tersebut:

Tabel 1. Perbandingan Informasi LKPD, LAKIP, LPPD

NO	IKHTISAR	JENIS LAPORAN			
		Laporan Pemerintah (LKPD)	Keuangan Daerah	Laporan Kinerja Pemerintah (LAKIP)	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
1	Dasar Hukum	UU 17/2003, PP 8/2006, PP 71/2010		a. PP No.8/2006 tentang Pelaporan keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah b. Permenpan 29/2007 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan c. SK LAN No 23/2009 akuntabilitas kinerja pemerintah	PP No.3/2007 PP 6/2008
2	Tujuan	Menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik ekonomi, sosial maupun politik		a. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan; b. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang; c. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang; d. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan;	-Menyajikan informasi tentang penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dijadikan sebagai bahan dalam melakukan perencanaan, pembinaan, pengawasan dan perbaikan -Menyajikan pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan pencapaian kinerja setiap urusan yang diselenggarakan pemerintah daerah
3	Isi Laporan	Pernyataan opini BPK, pernyataan tanggungjawab, neraca, LRA, arus kas, LPE, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional CALK.	Pernyataan opini BPK, LRA, arus kas, LPE, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional CALK.	A.Pendahuluan B.Perencanaan dan Perjanjian Kerja C.Akuntabilitas kinerja dan evaluasi kinerja. Ikhtisar eksekutif	BAB I Pendahuluan a.Dasar Hukum b.Gambaran Umum Daerah BAB II Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) a.Visi dan Misi b.Strategi dan Arah Kebijakan BAB III Urusan Desentralisasi a. Prioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan b.Prioritas Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan BAB IV Tugas Pembantuan a.Tugas Pembantuan Yang Diterima b.Tugas Pembantuan Yang Diberikan BAB V Tugas Umum Pemerintahan a.Kerjasama Antar Daerah b.Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga c.Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah d.Pembinaan Batas Wilayah e.Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana f.Pengelolaan Kawasan Khusus g.Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

4	Evaluasi/ Penilaian	BPK (Opini)	PIC: Menpan. Penilaian oleh Menpan dan BPKP. Peringkat diberikan Menpan (AA/memuaskan, A/sangat baik, B/Baik, CC/cukup baik, C/agak kurang, D/Kurang)	BAB VI Penutup PIC: Menteri Dalam Negeri Sangat Tinggi, Tinggi, sedang, rendah (EKPPD)
---	------------------------	-------------	--	---

Selain konten analisis dengan menggunakan cek list, peneliti juga melakukan wawancara dan FGD dengan tim penyusun LKPD, LAKIP dan LPPD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dan Kabupaten Malang. Penelitian ini menemukan beberapa hal :

1. Terjadi pengulangan informasi pada ketiga jenis laporan. LKPD, LAKIP dan LPPD ditemukan memuat beberapa informasi yang relatif sama hanya saja menggunakan format yang berbeda. Misalnya informasi tentang kondisi ekonomi daerah disajikan dalam LKPD pada bagian catatan atas laporan keuangan, disajikan dalam LAKIP pada bagian pendahuluan dan juga disajikan pada LPPD pada bagian gambaran umum daerah. Informasi tentang kinerja disajikan dalam LAKIP pada bagian akuntabilitas dan evaluasi kinerja juga disajikan dalam LPPD. Hal ini mengakibatkan terjadi pengulangan informasi yang sama pada 3 laporan yang berbeda dan dinilai tidak efektif oleh pengguna internal. Dalam forum FGD para penyusun laporan yang merupakan pengguna internal laporan pemerintah daerah menganggap *redundancy* informasi ini sebagai *overload information*. Temuan penelitian ini konsisten dengan hasil riset sebelumnya (Steccolini, 2008) bahwa laporan pemerintah daerah belum efektif dan belum menyajikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.
2. Terdapat inkonsistensi data yang digunakan dalam penyusunan laporan

Selain *redundancy*, penelitian ini juga menemukan terdapat beberapa inkonsistensi data yang digunakan dalam penyusunan laporan. Idealnya para penyusun laporan menggunakan data dari sumber yang sama sehingga validitas dan realibilitas data yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan. Namun pada prakteknya untuk informasi yang sama digunakan data yang berbeda-beda sehingga komparabilitas informasi yang tersaji pada ketiga laporan tersebut sulit dilakukan. Misalnya data-data umum yang tersaji dalam LKPD, LAKIP dan LPPD seperti pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk dan besaran anggaran ketiga laporan memuat angka yang berbeda.

Berbagai permasalahan diatas dapat diatasi dengan penyusunan satu laporan pemerintah daerah (*local government annual report*) yang komprehensif dan memuat semua informasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.

5.SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kandungan informasi yang tersaji dalam 3 laporan yang dihasil pemerintah daerah kabupaten/kota yang meliputi LKPD, LAKIP dan LPPD. Hasil penelitian menunjukkan terjadi pengulangan informasi yang sama pada tiga laporan yang berbeda. *Redundancy* informasi ini mengakibatkan *overload information* dan tidak efektifnya informasi yang tersaji dalam laporan pemerintah daerah. Selain itu juga terdapat inkonsistensi data yang tersaji pada ketiga laporan tersebut. Hal ini mengakibatkan kurangnya reliabilitas dan validitas informasi yang tersaji pada laporan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini konsisten dengan

temuan beberapa riset sebelumnya (Steccolini, 2008; Pablos, et. al, 2002, Mimba, 2012) yang menjelaskan kurangnya efektifitas laporan pemerintah daerah.

Penelitian ini baru dilakukan pada 3 laporan yang disusun pemerintah saja yaitu LKPD, LAKIP dan LPPD. Oleh karena itu penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada pemerintah daerah lain di Indonesia dan memasukkan unsur laporan lain yang harus disusun pemda seperti Lapora Pertanggungjawaban, ILPPD dan SLHD.

DAFTAR PUSTAKA

- Barton, A. (2009). Public and private sector accounting – The non-identical twins, *Australian Accounting Review*, Vol. 9, no. 2, pp22-31.
- Brignall, S. and Modell, S. (2000), An institutional perspective on performance measurement and management in the new public sector. *Management Accounting Research*, Vol. 11, pp. 281-306.
- Carnegie dan West. (2005). Making accounting accountable in the public sector. *Critical Perspective on Accounting*, vol.16, pp.905-928
- Chang, L. dan Most,K. (1985), The perceived usefulness of financial statements for investors decisions, *Florida International University Press*, Miami, FL
- Coy dan Pratt, (1998), An insight into accountability and politics in universities: a case study, *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol.11 No.5, pp.540-61
- Crawford, Gordon. Hermawan, P.Yulius (2002), Whose agenda? Partnership and international assistance to democratization and governance reform in Indonesia. *Contemporary Southeast Asia*
- DiMaggio, P.J. and Powell, W.W. (1983), The iron cage revisited: institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields, *American Sociological Review*, Vol. 48, pp. 147-60.
- Gudono. (2014). Teori Organisasi Edisi 3. PT.BPFE :Yogyakarta.
- Guthrie, J., Humphrey, C., Olson, O. (1999), Debating developments in new public financial management: The limits of global theorising and some new ways forward. *Financial Accountability and Management*, Vol. 15, no. 3-4, pp209-228.
- Halim, Abdul. (2007). Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 3. PT.Salemba Empat: Jakarta
- Hood, C. (1991), A Public management for all seasons? *Public Administration*, Vol. 69, no. 1, pp3-19.
- Hood, C. (1995), The new public management“ in the 1980s: variations on a theme, *Accounting, Organisations and Society*, Vol. 20, no. 2-3, pp93-109.
- Hooks, (2002), ”The Information gap in annual reports”, *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol.15 No.4, pp.501-522
- Inpres RI No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Jesus, Eirado,(2012), Relevance of accounting information to public sector accountability *Reviewed of applied management studies*, Vol (10) pp87-98
- Jones, (1999). Local Government Annual report: Mimicry in Action
- Kapucu, Naim (2009), New public management and governance perspectives in understanding public management, *Public Administration Review*,
- Kristiansen, et al, (2009). Public sector reforms and financial transparency: experiences from indonesian districts. *Contemporary Southeast Asia*, Vol.31 pp 64-87
- Kwon & Gorman, (2014), Links between performance measures & local economic development:examination of a two stage model of internal & external factors. *Public performance & Management Review*, vol 37. Pp658-678

- Lane, Jan-Erik. 2003. Management and public organization: The principal-agent framework. *University of Geneva and National University of Singapore*. Working paper.
- Lapsley, I. (2008), The NPM agenda: back to the future, *Financial Accountability & Management*, Vol. 24 No. 1, pp. 77-96.
- Martiningsih, RR Sri Pancawati. (2008). Analisis Kebutuhan Informasi Pemerintahan : Studi Pelaporan Keuangan Pemerintah. *Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada*
- Meyer, J. W. and B. Rowan. 1977. Institutionalized Organizations: Formal Structure as Financial Myth and Ceremony. *American Journal of Sociology* Vol. 83, pp. 340–63
- Mimba, Helden, Tillema (2013). The Design and use of performance information in Indonesian Local Government under diverging stakeholder pressures, *Public administration & Development Review*, Vol.33 pp 15-28
- Moe, T. M. 1984. The new economics of organization. *American Journal of Political Science* 28(5): 739-777.
- Pablos, Carcaba. 2002. The Annual report as a tool for financial disclosure in local governments. *International Journal of Management*. Vol.19 No.4
- Patton, J.M. (1992), Accountability and Government Financial Reporting. *Financial Accountability and Management*, Vol.3 No.3 pp.165-180
- Paulsson, Gert. (2006). Accrual Accounting In The Public Sector: Experiences From The Central Government In Sweden. *Financial Accountability & Management*
- Pemerintah RI Peraturan Pemerintah No 3/2007 tentang tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan PertanggungjawabanKepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi LaporanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.
- , Peraturan Pemerintah No 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- , Peraturan Pemerintah No 71/ 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 1 /2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 15 /2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 17 /2003 Tentang Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 33/2004 Tentang Perimbangan antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Ryan, Christine; Trevor Stanley dan Morton Nelson. (2000). Accountability Disclosure by Queensland Local Government Councils: 1997-1999. *Financial Accountability & Management*, Vol. 18 (3).
- Saliterer, Korac, (2013). Performance information use by politicians and public manager for internal control and external accountability purposes. *Critical Perspectives on Accounting*
- Scott, William R. 2000. Financial Accounting Theory. USA : *Prentice-Hall*
- Smith, C., Warner, J., 1970. On financial contracting: an analysis of bond covenants. *Journal of Economics* 7, pp117–161.
- Steccolini, Ileana. 2009. Local Government Annual Report: an Accountability Medium?. *Conference on Accounting and Auditing in Public Sector Reforms*
- Streim, Hannes. (1994). Agency Problem in Legal Political System and Supreme
- Strom, K. 2000. Delegation and accountability in parliamentary democracies. *European Journal of Political Research* 37: pp261-289.

- Thayer,(1978).The local government annual report as apolicy planning opportunity.
Public Administration Review Vol 38 No.4 pp. 373-376
- Thayer,Ralph.1979.Make city annual report useful. *Policy Analysis*.
- Zucker, L.G. (1977), The role of institutionalization in cultural persistence, *American Sociological Review*, Vol. 42, pp. 726-43